

Pengaruh Tata Kelola, Koneksi Politik, dan Kompensasi Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

**Richo Diana Aviyanti¹⁾, Heidy Paramitha Devi^{2)*}, Nik Amah³⁾, Dwi Nila Andriani⁴⁾,
Pramesti Wahyu Widiastuti⁵⁾**

¹²³⁵⁾ Accounting, Universitas PGRI Madiun, Indonesia

⁴⁾ Economics Education, Universitas PGRI Madiun, Indonesia

Email: rdiana@unipma.ac.id¹⁾, heidy@unipma.ac.id^{2)*}, nikamah@unipma.ac.id³⁾,
dwinila@unipma.ac.id⁴⁾, wahyuwidia99@gmail.com⁵⁾

*Corresponding author: heidy@unipma.ac.id

Abstrak

Perusahaan harus memenuhi ekspektasi publik untuk mempertahankan kontrak sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola, koneksi politik, dan kompensasi dewan direksi terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma positivisme. Populasi penelitian ini adalah seluruh emiten sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021. Sampel penelitian adalah 294 perusahaan. Data dianalisis menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, sedangkan koneksi politik dan besaran kompensasi dewan direksi tidak berpengaruh. Investor dan kreditor disarankan berinvestasi di perusahaan yang memiliki tata kelola dan mengungkapkan aktivitas TJS. Penelitian ini menggunakan pengukuran indeks yang lebih komprehensif.

Kata kunci: *Tanggung Jawab Sosial, Kompensasi Dewan Direksi, Tata Kelola, dan Koneksi Politik.*

The Effect of Corporate Governance, Political Connections, and Board of Directors Compensation on Social Responsibility Disclosure

Abstract

Companies must meet public expectations to maintain the social contract. This study aims to determine the effect of corporate governance, political connections, and board of directors compensation on social responsibility disclosure. This study uses a quantitative approach with a positivist paradigm. The population of this study is all issuers of the manufacturing sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2021. The research sample is 294 companies. Data were analyzed using multiple regression. The results show that corporate governance positively affects social responsibility, while political connections and board of directors compensation have no effect. Investors and creditors are advised to invest in companies with good governance and disclose CSR activities. This study uses a more comprehensive index measurement.

Keywords: *Social Responsibility Disclosure, Board of Directors Compensation, Corporate Governance, and Political Connections.*

PENDAHULUAN

Teori legitimasi meyakini adanya kontrak sosial antara organisasi dan lingkungan organisasi beroperasi. Kontrak sosial secara implisit didefinisikan sebagai ekspektasi publik yang berhubungan dengan bagaimana organisasi seharusnya beroperasi. Publik berekspektasi bahwa perusahaan akan memikirkan dampak terhadap manusia, lingkungan serta sosial akibat dari aktivitas perusahaan. Publik juga mengekspektasikan bahwa perusahaan akan menanggulangi dan mencegah kerusakan dari lingkungan, memastikan keamanan dan kesehatan konsumen maupun karyawan serta masyarakat yang berada di lingkungan pembuatan produk dan pembuangan limbah.

Konsekuensi dari adanya ekspektasi publik tersebut adalah perusahaan yang menunjukkan kinerja sosial dan lingkungan yang buruk akan kesulitan mendapatkan sumber daya dan dukungan keberlanjutan operasional dari masyarakat. Kasus kerugian dan kebangkrutan yang terjadi karena dicabutnya kontrak sosial seperti kasus PT. Lapindo Brantas yang kehilangan eksistensinya karena melakukan pengeboran yang melewati batas yang ditentukan yang berakibat kawasan pemukiman penduduk, pertanian, dan perindustrian tergenang lumpur serta mempengaruhi aktivitas ekonomi di Jawa Timur (Intakhiya et al., 2021). Kasus PT Indominco anak perusahaan PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. yang dikenai denda Rp 2 Miliar karena terbukti bersalah membuang (dumping) limbah tanpa izin ke sungai (Kontan.co.id, 2018).

Kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa eksistensi perusahaan bisa terancam karena masalah kontrak sosial. Oleh karena itu, perusahaan juga harus memberikan fokus terhadap kinerja sosial dan lingkungannya. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan adalah tata kelola perusahaan. Hasil studi menunjukkan bahwa tata kelola yang diprosikan dengan proporsi dewan komisaris mampu meningkatkan pengungkapan CSR karena terdapat pengawasan dari pihak independen (Hu & Loh, 2018; Nguyen & Nguyen, 2020; Ong & Djajadikerta, 2018). Hasil sebaliknya menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris tidak mampu meningkatkan pengungkapan CSR karena tidak semua anggota dewan komisaris independen belum menganggap perlu mengenai ada atau tidaknya pengungkapan CSR (Ikhsan et al., 2021; Liana, 2019; Sulistyawati & Qadriatin, 2018; Suprobo & Setiadarma, 2017).

Hasil studi yang tidak konsisten salah satunya disebabkan karena tata kelola masih diuji secara individu (proksi). Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji tata kelola dengan indeks KNKG yang mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. SE OJK diyakini lebih sempurna karena telah berpedoman pada praktik internasional, mempertimbangkan sektor

industri, ukuran, dan kompleksitas perusahaan terbuka. Pengukuran tata kelola dengan indeks KNKG juga sekaligus menjadi kebaruan dalam penelitian ini.

Koneksi politik juga dibuktikan memiliki pengaruh terhadap peningkatan pengungkapan CSR. Perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan politisi atau pemerintah diyakini akan mengungkapkan CSR lebih luas (Muliwati & Hariyati, 2021; Rahman & Ismail, 2016; Sulistyowati & Prabowo, 2020). Hal ini disebabkan perusahaan akan berusaha meningkatkan dan menciptakan *value*-nya kepada seluruh *stakeholder* yang dimiliki yang akan berdampak pada keberlanjutan bisnis (Muliwati & Hariyati, 2021). Hasil sebaliknya, menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik justru akan mengurangi pengungkapan CSR (Hung et al., 2018; Muttakin & Khan, 2014; Saraswati et al., 2020). Hal ini disebabkan dengan memiliki koneksi politik melalui direksi atau komisaris, perusahaan akan lebih mudah untuk memperoleh perlindungan litigasi sehingga terjadi pengurangan biaya CSR (Saraswati et al., 2020).

Hasil studi yang tidak konsisten disebabkan karena sebagian besar studi mengukur koneksi politik dengan proporsi kepemilikan saham pemerintah. Penelitian ini akan menguji kembali koneksi politik dengan menggunakan pengukuran berdasarkan jabatan struktural pemerintahan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mengacu penelitian Supatmi et al. (2019). Kebaruan tersebut diyakini mampu menyajikan hasil yang lebih komprehensif terkait kondisi perusahaan dengan koneksi politik di Indonesia.

Kompensasi dewan direksi memiliki peran penting dalam keputusan tentang pengungkapan pelaporan (Rashid et al., 2020). Besaran kompensasi dewan direksi dapat menunjukkan kuat atau lemahnya kekuatan Dewan direksi di perusahaan (Rachmawati et al., 2021). Hasil studi menunjukkan bahwa kekuatan Dewan direksi akan berdampak negatif pada kinerja CSR (Rachmawati et al., 2021; Rashid et al., 2020). Hal ini dikarenakan dewan direksi hanya berfokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek, sedangkan aktivitas CSR membutuhkan biaya tinggi dan prospek keuntungan jangka panjangnya tidak pasti sehingga dewan direksi akan menganggap sebagai pemborosan (Martínez & Gallego-Álvarez, 2021). Dewan direksi juga menganggap masalah keuangan lebih penting dibandingkan masalah CSR (Rachmawati et al., 2021). Hasil sebaliknya menunjukkan bahwa semakin besar kekuatan Dewan direksi maka semakin tinggi pengungkapan CSR-nya (Ikhsan et al., 2021). Dewan direksi akan berinvestasi dalam CSR sebagai bagian dari *sustainability* untuk menyeimbangkan kepentingan seluruh *stakeholder* dan menciptakan keunggulan kompetitif (Rashid et al., 2020). Kegiatan CSR juga dapat meredam konflik kepentingan (Jo & Harjoto, 2011).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Legitimasi

Teori legitimasi meyakini adanya kontrak sosial antara perusahaan dan lingkungan operasional perusahaan. Kontrak sosial berhubungan dengan ekspektasi publik tentang bagaimana perusahaan seharusnya beroperasi. Publik mengekspektasikan bahwa perusahaan akan memikirkan dampak operasionalnya terhadap manusia, lingkungan serta sosial (Deegan, 2014). Publik juga mengekspektasikan bahwa perusahaan akan menanggulangi dan mencegah kerusakan dari lingkungan, memastikan keamanan dan kesehatan konsumen maupun karyawan serta masyarakat yang berada di lingkungan pembuatan produk dan pembuangan limbah.

Masyarakat akan mengizinkan organisasi untuk melanjutkan operasionalnya ketika operasi perusahaan memenuhi ekspektasi masyarakat dan bukan hanya sekedar memenuhi kepentingan investor. Jika organisasi atau perusahaan gagal memenuhi ekspektasi masyarakat, maka masyarakat akan menjatuhkan sanksi dalam bentuk pengajuan tuntutan hukum, maupun membatasi sumber daya dan mengurangi permintaan atas produk tersebut. Jika dikaitkan dengan kontrak sosial, maka perusahaan yang tidak beroperasi sesuai dengan ekspektasi publik maka masyarakat dapat mencabut “kontrak” keberlanjutan perusahaan.

Perubahan ekspektasi masyarakat harus diadaptasi dan diikuti oleh perusahaan. Artinya adalah ketika ekspektasi publik mengenai kinerja berubah, maka perusahaan harus menunjukkan bahwa apa yang perusahaan lakukan juga mengalami perubahan. Pengungkapan informasi kepada publik dalam laporan tahunan dapat digunakan oleh organisasi untuk mengimplementasikan beberapa strategi pemenuhan ekspektasi tersebut. Perusahaan melalui laporan tahunan dapat meniadakan berita buruk yang akan berdampak negatif ketika dipublikasikan atau dapat menonjolkan keunggulan perusahaan dengan menampilkan penghargaan lingkungan yang dimenangkan maupun implementasi keamanan perusahaan. Salah satu fungsi akuntansi khususnya laporan akuntansi adalah untuk melegitimasi keberadaan perusahaan.

Hipotesis

Pengaruh Tata Kelola Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Aktivitas pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan legitimasi publik. Publik menginginkan performa CSR yang maksimal sedangkan perusahaan memiliki pertimbangan atas biaya dan manfaat ketika mengambil keputusan melakukan CSR (Yip et al., 2011). Salah satu upaya untuk mempersempit kesenjangan kepentingan tersebut adalah implementasi tata kelola perusahaan. Penerapan tata Kelola perusahaan diharapkan akan meningkatkan mekanisme pengawasan perusahaan dari pihak

internal, eksternal maupun pemerintah (Kim et al., 2010) yang dapat mendorong kinerja CSR lebih optimal.

Penerapan pengawasan yang optimal melalui tata kelola perusahaan dianggap mampu meningkatkan performa CSR (Giannarakis et al., 2020; Hu & Loh, 2018; Nguyen & Nguyen, 2020; Ong & Djajadikerta, 2018). Hal ini dikarenakan tata kelola perusahaan mengharuskan terciptanya distribusi hak dan tanggung jawab secara adil yang dilakukan oleh perusahaan maupun para pemangku kepentingan (OECD, 2015). Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis pertama yang diajukan sebagai berikut.

H1: Tata Kelola berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Aktivitas pengungkapan tanggung jawab sosial membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, perusahaan akan memanfaatkan koneksi politik yang dimiliki untuk memperoleh legitimasi *stakeholder* selain dari aktivitas CSR. Memiliki hubungan dengan politisi atau petinggi pemerintah dapat membantu perusahaan memperoleh pengawasan CSR yang lebih lengang (Muttakin & Khan, 2014).

Hasil studi menunjukkan bahwa keberadaan anggota dewan yang tekoneksi politik dalam perusahaan akan mengurangi pengungkapan CSR (Hung et al., 2018; Muttakin & Khan, 2014; Saraswati et al., 2020). Hal ini dikarenakan koneksi politik memfasilitasi perusahaan untuk memperoleh pendanaan/modal lebih mudah, mengurangi tekanan publik, dan mengurangi risiko litigasi (Saraswati et al., 2020). Oleh karena itu, kebutuhan memperoleh legitimasi melalui aktivitas lingkungan dan sosial akan berkurang. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis pertama yang diajukan sebagai berikut.

H2: Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

Pengaruh Kompensasi Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Dewan direksi memiliki kekuatan untuk mengontrol kegiatan operasional perusahaan termasuk kinerja CSR. Hasil studi menunjukkan bahwa semakin besar kekuatan Dewan direksi maka semakin tinggi pengungkapan CSR-nya (Ikhsan et al., 2021). Dewan direksi dengan kompensasi yang tinggi diyakini tidak lagi berorientasi pada kekayaan pribadi namun akan melakukan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Oleh karena itu, dewan direksi dengan insentif tinggi akan memaksimalkan performa CSR sesuai dengan harapan *stakeholder*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis pertama yang diajukan sebagai berikut.

H3: Kompensasi Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma positivisme. Paradigma positivisme merupakan paradigma dengan metoda induktif yakni menguji kembali teori pada fenomena yang ingin diteliti serta menguji hubungan sebab-akibat melalui manipulasi dan observasi yang dilakukan (Sekaran & Bougie, 2016).

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh emiten sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 (Sebanyak 298 perusahaan terdaftar). Daftar populasi diakses melalui situs www.idx.co.id. Sampel dipilih dengan menggunakan metoda *purposive sampling*. Adapun kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2021.
2. Melaporkan aktivitas CSR dari tahun 2021.

Data dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*). Data terkait informasi tata kelola perusahaan, kompensasi dewan direksi, koneksi politik, dan aktivitas CSR diperoleh dengan cara mengakses laporan tahunan di situs Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id maupun *website* masing-masing perusahaan.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Tanggung Jawab Sosial

Tanggung Jawab Sosial merupakan aktivitas sosial yang digunakan sebagai pemenuhan pertanggungjawaban pada *stakeholder* untuk menyajikan informasi terkait interaksi perusahaan dengan lingkungan fisik, sosial serta informasi yang terkait dengan dukungan perusahaan kepada karyawan, komunitas lokal, komunitas asing, catatan keselamatan serta penggunaan sumber daya alam (Deegan, 2014).

Penilaian pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan pedoman laporan keberlanjutan G4 yang dikeluarkan *Global Reporting Initiative* yang terdiri dari beberapa indikator dari kategori ekonomi, lingkungan, dan sosial. Indeks tata kelola perusahaan dalam penelitian mengacu pada perhitungan Setiani & Sinaga (2021) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$TJS = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Total keseluruhan item indikator}}$$

Variabel Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai upaya mewujudkan lingkungan perusahaan terpercaya, transparan dan akuntabel yang diperlukan untuk mendorong investasi jangka anjang, stabilitas keuangan dan bisnis yang berintegritas sehingga mendukung pertumbuhan perusahaan yang lebih kuat dan masyarakat yang lebih inklusif (OECD, 2015).

Mekanisme tata kelola perusahaan dalam penelitian ini akan diuji menggunakan mekanisme selain pengujian secara index dengan menggunakan rekomendasi tata kelola perusahaan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Indeks tata kelola perusahaan dalam penelitian mengacu pada perhitungan Agustina (2016) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Tata\ Kelola = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Total keseluruhan item indikator}}$$

Variabel Koneksi Politik

Perusahaan yang digolongkan sebagai perusahaan terkoneksi politik adalah perusahaan dengan salah satu pemegang saham besar atau dewan komisaris atau dewan direksi perusahaan merupakan: (a) anggota parlemen, (b) menteri atau kepala pemerintah daerah atau (c) memiliki hubungan dekat dengan politisi atau partai politik (Habib et al., 2017).

Koneksi politik yang terdapat dalam perusahaan akan diberi skor menurut posisi atau jabatan dan statusnya. Pemberian skor dalam penelitian ini mengacu penelitian Supatmi et al. (2019). Pemberian skor akan dibedakan antara koneksi politik dari pihak yang sedang (masih) menjabat pada periode penelitian dan pihak yang sudah tidak lagi menjabat (mantan). Skor yang lebih besar akan diberikan bagi perusahaan dengan koneksi politik yang sedang (masih) menjabat. Hal tersebut didasarkan pertimbangan tingkat koneksi yang diberikan oleh pihak yang sedang (masih) menjabat lebih tinggi dari pihak yang sudah selesai menjabat. Skor untuk pihak koneksi politik yang masih menjabat diberi skor 2 (jenjang terendah) hingga 9 (jenjang tertinggi). Pihak terkoneksi politik yang sudah tidak aktif (mantan) akan diberi skor 1 (jenjang terendah) hingga 8 (jenjang tertinggi). Perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik akan diberi skor 0.

Indeks koneksi politik (IKP) yang dimiliki perusahaan akan dihitung dengan logaritma natural total skor koneksi politik dalam perusahaan ditambah satu poin atau dapat dirumuskan dengan $\text{Ln}(\text{IKP}) = \text{Ln}(1 + \text{IKP})$.

Variabel Kompensasi Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah jabatan untuk jajaran eksekutif tertinggi dalam suatu perusahaan dan bertanggung jawab atas berjalannya perusahaan. Kompensasi dewan direksi diukur berdasarkan kompensasi tahunan dewan direksi kemudian di logaritma sesuai penelitian yang dilakukan oleh Li et al. (2016).

$$\text{Kompensasi} = \ln(\text{Kompensasi Tahunan Dewan Direksi})$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1: Statistika Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
TJS	294	0,00	0,62	0,2309	0,08933
TATA_KELOLA	294	0,24	1,00	0,7320	0,24078
KONEKSI	294	0,00	3,78	1,2585	1,27057
DR	294	0,04	1,19	0,4992	0,18715

Berdasarkan tabel 1 nilai rata-rata Tanggung Jawab Sosial (TJS) adalah 0,2309 dengan deviasi standar 0,08933. Nilai rata-rata lebih besar dari deviasi standar mengindikasikan nilai minimum dan maksimum selama periode pengamatan memiliki variasi atau kesenjangan yang kecil. Tata kelola (TATA_KELOLA) dinilai dengan mengukur seberapa banyak perusahaan telah menerapkan rekomendasi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015. Berdasarkan tabel 1, perusahaan sampel rata-rata memiliki nilai penerapan rekomendasi sebesar 0,7320 atau telah menerapkan 17 hingga 18 rekomendasi berdasarkan SE OJK. Nilai deviasi standar sebesar 0,24078 lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan rendahnya variasi antara nilai minimum dan maksimum selama periode pengamatan. Dewan direksi (DR) memiliki nilai rata-rata 0,4992 dan nilai deviasi standar sebesar 0,18715. Nilai tersebut mengindikasikan nilai minimum dan maksimum selama periode pengamatan memiliki variasi atau kesenjangan yang kecil.

Tabel 2: Hasil Uji Hipotesis

Variable	Coefficient	T value	Sig.	Sig. two tailed	Keputusan
TATA_KELOLA	0,032732	1,487	0,0138	0,0069	H1 Accepted
KONEKSI	0,000059	0,014	0,989	0,4945	H2 Rejected
DR	-0,031029	-1,107	0,269	0,1345	H3 Rejected
F	1,127				
Sig F.	0,0169				
Adj R2	0,001				

Data dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, heteroskedastisitas serta multikolinearitas. Hasil regresi penelitian ini disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2, penelitian ini memiliki nilai Adjusted R² sebesar 0,001. Angka tersebut berarti variabel dalam model dapat mempengaruhi pengungkapan TJS 0,1% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian. Uji F bertujuan untuk menguji kesesuaian model serta mengamati ada atau tidaknya variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Uji F penelitian ini memiliki nilai sig ANOVA < 0,05 (0,0169) dengan nilai F sebesar 1,127. Artinya setidaknya terdapat satu variabel independen yang berpengaruh yaitu tata kelola. Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel tata kelola memiliki nilai signifikansi signifikan sebesar $0,0069 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel tata kelola berpengaruh terhadap pengungkapan TJS (H1 Didukung).

Variabel koneksi politik memiliki nilai signifikansi sebesar $0,4945 > 0,05$ dengan koefisien positif. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel koneksi politik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan TJS (H2 ditolak). Kompensasi dewan direksi memiliki nilai signifikansi sebesar $0,1345 < 0,05$ dengan koefisien bertanda negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kompensasi dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja CSR. Koefisien negatif terhadap kinerja CSR berarti penurunan aktivitas CSR (H3 Ditolak).

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, tata kelola berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJS. Temuan ini berbeda dengan temuan Castillo-Merino & Rodríguez-Pérez (2021) dan Wardah & Nugrahaningsih (2020), bahwa tata kelola mampu meminimalkan pengungkapan CSR. Hasil studi konsisten dengan temuan Fajriyanti et al. (2021) yang membuktikan bahwa tata kelola mampu memaksimalkan kinerja CSR. Hasil penelitian ini mendukung implementasi tata kelola untuk meningkatkan kontrol dari perspektif teori legitimasi maupun teori *stakeholder*. Tata kelola perusahaan mampu mengatur hubungan antara pemangku kepentingan perusahaan dalam memenuhi kepentingan masing-masing pihak yang dapat menciptakan peningkatan legitimasi dan *sustainability* di perusahaan manufaktur. Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 1, perusahaan sampel telah menunjukkan penerapan tata kelola perusahaan dengan nilai rata-rata 0,7138 atau 71,38%.

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa hubungan politik tidak berpengaruh terhadap kinerja CSR. Hasil penelitian ini sesuai dengan Hung et al. (2018), Saraswati et al. (2020), dan Wardah & Nugrahaningsih (2020). Perusahaan dengan koneksi politik akan mengurangi CSR. Memiliki koneksi politik di posisi eksekutif akan memudahkan perusahaan untuk mendapatkan hukum (Saraswati et al., 2020).

Hasil uji hipotesis ditemukan bahwa variabel kompensasi dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan TJS dengan koefisien negatif. Besarnya kompensasi tahunan yang diterima oleh dewan direksi akan mengurangi kegiatan CSR perusahaan. Dewan direksi lebih memilih untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi jangka pendek. CSR membutuhkan biaya tinggi, dan prospek keuntungan jangka panjang tidak pasti dan dianggap sia-sia. Hasil penelitian ini mengikuti penelitian Rachmawati et al. (2021) dan Rashid et al. (2020).

SIMPULAN

Penelitian ini menguji pengaruh tata kelola, koneksi politik, dan kompensasi dewan direksi terhadap pengungkapan TJS. Penerapan tata kelola mampu meningkatkan pengungkapan TJS. Tata kelola perusahaan dapat mengontrol dan mengelola hubungan seluruh pemangku kepentingan untuk memenuhi kepentingan masing-masing, termasuk kinerja CSR. Perusahaan dengan koneksi politik cenderung mengurangi kegiatan CSR. Besaran kompensasi dewan direksi tidak mampu meningkatkan pengungkapan aktivitas TJS karena lebih direksi lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek.

Referensi

- Agustina, I. (2016). *Pengaruh Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan melalui Enterprise Risk Management (ERM) dan Sustainability Management (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)*. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
- Castillo-Merino, D., & Rodríguez-Pérez, G. (2021). The Effects of Legal Origin and Corporate Governance on Financial Firms' Sustainability Performance. *Sustainability*, *13*, 1–20.
- Deegan, C. (2014). *Financial Accounting Theory* (4th editio). McGraw-Hill Education Pty Ltd.
- Fajriyanti, N., Sukoharsono, E. G., & Adib, N. (2021). Examining the effect of diversification, corporate governance and intellectual capital on sustainability performance. *International Journal of Research in Business and Social Science*, *10*(2), 12–20.
- Giannarakis, G., Andronikidis, A., & Sariannidis, N. (2020). Determinants of environmental disclosure: investigating new and conventional corporate governance characteristics. *Annals of Operations Research*, *294*, 87–105.
- Habib, A., Muhammadi, A. H., & Jiang, H. (2017). Political Connections and Related Party Transactions: Evidence from Indonesia. *The International Journal of Accounting*, *52*(1), 45–63.
- Hu, M., & Loh, L. (2018). Board Governance and Sustainability Disclosure: A Cross-Sectional Study of Singapore-Listed Companies. *Sustainability*, *10*(2578), 1–14.
- Hung, M., Kim, Y., & Li, S. (2018). Political connections and voluntary disclosure: Evidence from around the world. *Journal of International Business Studies*, *49*(3), 272–302.
- Ikhsan, A., Nurlaila, Suprasto, H. B., & Batubara, F. (2021). Determinant of The Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence of Indonesian Manufacturing Companies. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, *16*(1), 71-83.
- Intakhiya, D. M., Santoso, U. P., & Mutiarin, D. (2021). Strategi Dalam Penanganan Kasus Lumpur Lapindo Pada Masyarakat Terdampak Lumpur Lapindo Porong-Sidoarjo Jawa Timur. *Jurnal MODERAT*, *7*(3), 565–585.
- Jo, H., & Harjoto, M. A. (2011). Corporate Governance and Firm Value: The Impact of Corporate Social Responsibility. *Journal of Business Ethics*, *103*, 351–383.
- Kim, I. J., Eppler-Kim, J., Kim, W. S., & Byun, S. J. (2010). Foreign investors and corporate governance in Korea. *Pacific-Basin Finance Journal*, *18*(4), 390–402.

- Kontan.co.id. (2018). *Indo Tambangraya pastikan aktivitas anak usahanya tak terganggu*. Kontan.Co.Id. <https://industri.kontan.co.id/news/indo-tambangraya-pastikan-aktivitas-anak-usahanya-tak-terganggu>
- Li, F., Li, T., & Minor, D. (2016). CEO power, corporate social responsibility, and firm value: A test of agency theory. *International Journal of Managerial Finance*, 12(5), 611–628.
- Liana, S. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 2(2), 199–208.
- Martínez, M. C. P., & Gallego-Álvarez, I. (2021). The Role of CEO Power on CSR Reporting: The Moderating Effect of Linking CEO Compensation to Shareholder Return. *Sustainability*, 13(3197), 1–21.
- Muliwati, A. R., & Hariyati. (2021). Pengaruh Koneksi Politik dan Media Exposure Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 11(2), 72–81.
- Muttakin, M. B., & Khan, A. (2014). Determinants of corporate social disclosure: Empirical evidence from Bangladesh. *Advances in Accounting*, 30(1), 168–175.
- Nguyen, A. H., & Nguyen, L. H. (2020). Determinants of Sustainability Disclosure: Empirical Evidence from Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(6), 73–84.
- OECD. (2015). *Glossary of Statistical Terms: Corporate Governance*. https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/coded_files/OECD_glossary_stat_terms.pdf
- Ong, T., & Djajadikerta, H. G. (2018). Corporate governance and sustainability reporting in the Australian resources industry: an empirical analysis. *Social Responsibility Journal*, 16(1), 1–14.
- Rachmawati, A., Roekhudin, & Prastiwi, A. (2021). Effect Of Ownership Structures And Ceo Power To Csr Performance Moderated By Profitability. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(2), 519–533.
- Rahman, I. M. A., & Ismail, K. N. I. K. (2016). The effects of political connection on corporate social responsibility disclosure – evidence from listed companies in Malaysia. *International Journal of Business and Management Invention*, 5(2), 16–21.
- Rashid, A., Shams, S., Bose, S., & Khan, H. (2020). CEO power and corporate social responsibility (CSR) disclosure: does stakeholder influence matter? *Managerial Auditing Journal*, 35(9), 1279–1312.
- Saraswati, E., Sagitaputri, A., & Rahadian, Y. (2020). Political Connections and CSR Disclosures in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 17(11), 1097–1104.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach* (7th Editio). Illinois University at Carbondale (SIUC).

- Setiani, M. A., & Sinaga, I. (2021). Penentuan Pengungkapan Sustainability Report dengan GRI Standar pada Sektor Non-Keuangan. *Jurnal Gentiaras Manajemen Dan Akuntansi*, 13(1), 23–35.
- Sulistiyawati, A. I., & Qadriatin, A. (2018). Pengungkapan Sustainability Report dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Majalah Ilmiah Solusi*, 16(4), 1–22.
- Sulistiyowati, N., & Prabowo, T. J. W. (2020). Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Kinerja Lingkungan dan Profitabilitas. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9(3), 1–15.
- Supatmi, Sutrisno, T., Saraswati, E., & Purnomosidhi, B. (2019). The Effect of Related Party Transactions on Firm Performance: The Moderating Role of Political Connection in Indonesian Banking. *Usiness: Theory and Practice*, 20, 81–92.
- Suprobo, F. P., & Setiadarma, E. (2017). Sustainability Report dan Tata Kelola: Influencers dalam Kinerja Perusahaan Property & Konstruksi. *Seminar Nasional Ilmu Terapan (SNITER)*, 1(1).
- Wardah, A. M., & Nugrahaningsih, P. (2020). Analisis Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Industri Perbankan Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani*, 8(2), 134–156.
- Yip, E., Staden, C. Van, & Cahan, S. (2011). Corporate Social Responsibility Reporting and Earnings Management: The Role of Political Costs. *Australasian Accounting Business and Finance Journal*, 5(3), 17–34.